

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis				
1.1	Indikator 1.1 Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Rp Triliun	Rp 9,96 T (TW1: Rp2,49 T)	Rp1,6 T*	64,25%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi	Persentase	54% (TW1: 54%)	61,89%	114,1%
1.3	Indikator 1.3 Persentase Debitur KUR Baru	Persentase	40% (TW1: 10%)	95,67%	120%
1.4	Indikator 1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas	Persentase	20% (TW1: 5%)	43,92%	120%
1.5	Indikator 1.5 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Rp Triliun	Rp251,17 T (TW1: 62,79 T)	Rp68,17 T	108,56%
1.6	Indikator 1.6 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA)	Rp Miliar	Rp93,24 (TW1: 23,31 M)	Rp31,99 M	120%
1.7	Indikator 1.7 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	Rp Triliun	Rp17,58 M (TW1:Rp4,39 M)	Rp66,37 M	120%
1.8	Indikator 1.8 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP)	Rp Triliun	Rp11,24 (TW1:Rp2,81 T)	Rp10,12 T	120%
1.9	Indikator 1.9 Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana	Persentase	80% (TW1: 20%)	20%	100%

1.10	Indikator 1.10 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	80% (TW1: 20%)	20%	100%
II	Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas				
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana	Persentase	80% (TW1: 20%)	20%	100%
2.1	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion	Persentase	80% (TW1: 20%)	20%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas				
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Indeks	3 dari 4 (TW I: -)	3 dari 4**	120%
IV	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas				
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	85% (TW 1: 20%)	20%	100%

*Penghitungan berdasarkan realisasi dan proyeksi TW I 2026

**Merujuk realisasi 2025 dan proyeksi Semester I 2026

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas BUMN di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis ditunjukkan oleh pencapaian enam indikator kinerja, yaitu:

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Latar Belakang

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)). BUMN mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi penerimaan negara baik dalam bentuk dividen, pajak, PNBP maupun peran ekonomi lainnya. Dalam menjalankan usahanya selain mencari keuntungan BUMN juga menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, perintisan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, serta aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha kecil melalui program kemitraan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan peran strategisnya, BUMN juga didorong untuk merealisasikan investasi melalui belanja modal yang produktif, khususnya pada sektor industri jasa keuangan dan usaha bisnis. Belanja modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional, mendorong substitusi impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah dalam negeri.

Pengembangan Usaha BUMN merupakan upaya pengelolaan BUMN melalui pengembangan dan diversifikasi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi, peningkatan sinergi antar BUMN, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN sehingga dapat memberikan kontribusi penerimaan negara.

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertumbuhan *output* dalam periode tertentu yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, belanja modal BUMN di sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis berperan sebagai pendorong investasi yang mendukung peningkatan kapasitas produksi, daya saing industri, dan transformasi ekonomi nasional.

BUMN bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria diantaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), atau BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, serta di bawah koordinasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (BUMN Himbara) dengan target: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp3,0 Triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp2,7 Triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1,4 Triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk sebesar Rp1,6 Triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp1,2 Triliun, sehingga total target Belanja Modal (Capex) BUMN Himbara tahun 2026 sebesar Rp9,96 Triliun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar Rp1,6 triliun dengan target Triwulan I 2026 Rp2,49 triliun, sehingga realisasi sebesar 64,25% dari target, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.1. Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.	Rp T	Rp2,49 T	Rp1,6 T*	64,25%

*Penghitungan berdasarkan proyeksi TW I 2026

Target Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp9,96 triliun. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi mencapai Rp1,6 triliun atau 64,25% dari target Triwulan I sebesar Rp2,49 triliun.

Capaian tersebut didasarkan pada realisasi dan proyeksi Belanja Modal BUMN Himbara yang diperoleh melalui koordinasi dalam rangka percepatan realisasi belanja modal pada Triwulan I Tahun 2026. Adapun untuk mencapai target yang ditetapkan, dilakukan penguatan koordinasi dengan BP BUMN dan BUMN terkait, serta pemantauan berkala terhadap progres pelaksanaan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Realisasi
1	Identifikasi dan inventarisasi rencana belanja modal (Capital Expenditure/Capex) BUMN HIMBARA serta rencana pemanfaatan belanja modal (Capex)	Terlaksana	- Surat Nomor: T/BUM.01/98/D.I.M.EKON/05/2026, tanggal 12 Mei 2026, hal Permintaan Data Target Realisasi Capex BUMN 2026 dan Realisasi Capex BUMN Triwulan I 2026 - Monitoring dan evaluasi on desk Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Himbara pada Triwulan I Tahun 2026
2	Koordinasi dengan BP BUMN terkait penetapan target Belanja Modal BUMN HIMBARA	Terlaksana	Surat Nomor: T/BUM.01/98/D.I.M.EKON/05/2026, tanggal 12 Mei 2026, hal Permintaan Data Target Realisasi Capex BUMN

			2026 dan Realisasi Capex BUMN Triwulan I 2026
3	Monitoring rencana belanja infrastruktur Layanan Keuangan	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi on desk Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Himbara pada Triwulan I Tahun 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan BUMN terkait guna mendorong percepatan realisasi belanja modal Tahun 2026
2. Menghimpun data Realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Himbara Triwulan I Tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan prinsip efisiensi pemanfaatan sumber daya. Implementasi efisiensi pemanfaatan sumber daya dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi sehingga berorientasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pelaporan realisasi Belanja Modal BUMN Himbara dengan kebutuhan penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi yang diperlukan belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam proses konsolidasi oleh BUMN;
2. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Meningkatkan koordinasi capaian realisasi Jumlah Belanja Modal BUMN Himbara serta pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja Belanja Modal BUMN terkait;
2. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Belanja Modal BUMN Himbara.

1.2 Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung Perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta Perusahaan Penjaminan/Asuransi selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga

keuangan penyalur KUR, BUMN HIMBARA merupakan penyalur utama KUR di samping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Penyaluran KUR di sektor produksi adalah porsi penyaluran KUR di sektor produksi dibandingkan dengan total penyaluran KUR sektor produksi dan nonproduksi selama 1 (satu) tahun.

Adapun target penyaluran KUR pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp251,17 triliun, dengan alokasi penyaluran ke sektor produksi sebesar 54%. Agar proporsi penyaluran KUR di sektor produksi tetap terjaga perlu adanya penetapan target penyaluran pada setiap triwulan sebesar 54%. Yang dimaksud dengan sektor produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa di luar sektor perdagangan. Dengan demikian, capaian penyaluran KUR di sektor produksi mencerminkan akumulasi penyaluran KUR pada seluruh sektor kegiatan ekonomi selain sektor perdagangan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi sebesar 61,49% dengan target Triwulan I 2026 sebesar 54%, sehingga tercapai 114,61%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.2 Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi	Persentase	54%	61,89%	114,61%

Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 54%. Sampai dengan Triwulan I 2026, Persentase Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi telah terealisasi sebesar 61,89% atau mencapai 114,61% dari target Triwulan I 2026.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I 2026	Status	Realisasi
1	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026	Terlaksana	Telah diterbitkan Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 13 Januari 2026

2	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis terkait konsep perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
3	Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026	Terlaksana	Sosialisasi Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 12 Februari 2026
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Triwulan I 2026	Terlaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Pelaksanaan KUR Triwulan IV Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Penyalur dan Penjamin KUR guna mendorong optimalisasi penyaluran KUR di Sektor Produksi;
2. Melakukan analisis *on desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran KUR di Sektor Produksi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada sektor nonproduksi.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta *stakeholder* terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUR di Sektor Produksi.

1.3 Persentase Debitur KUR Baru

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung Perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta Perusahaan Penjaminan/Asuransi selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN HIMBARA merupakan penyalur utama KUR di samping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.

Debitur KUR Baru adalah debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR. Persentase debitur baru adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Debitur KUR Baru sebesar 95,67% dengan target Triwulan I 2026 sebesar 10%, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.3 Persentase Debitur KUR Baru	Persentase	10%	95,67%	120%

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Maret 2026, total debitur KUR s.d. 31 Maret 2026 sebanyak 1,11 juta debitur. Persentase Debitur KUR Baru dengan target tahun 2026 sebesar 40%. Sampai dengan Triwulan I 2026, total debitur baru KUR mencapai 1,062 juta debitur atau telah terealisasi sebesar 95,67% atau mencapai 120% dari target Triwulan I 2026 sebesar 10%.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Realisasi
1	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026	Terlaksana	Telah diterbitkan Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 13 Januari 2026

2	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis terkait konsep perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
3	Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026	Terlaksana	Sosialisasi Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 12 Februari 2026
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Triwulan I 2026	Terlaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Pelaksanaan KUR Triwulan IV Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Penyalur dan Penjamin KUR guna mendorong optimalisasi penyaluran KUR kepada Debitur KUR baru;
2. Melakukan analisis *on desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran KUR kepada Debitur KUR baru.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada debitur eksisting.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta *stakeholder* terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUR kepada Debitur KUR baru.

1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung Perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta Perusahaan Penjaminan/Asuransi selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN HIMBARA merupakan penyalur utama KUR di samping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.

Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas adalah debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antarskema; dan Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial. KUR Super Mikro adalah KUR sampai dengan Rp10 juta, KUR Mikro lebih dari Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta, KUR Kecil lebih dari Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta, dan Kredit Komersial merupakan kredit selain KUR atau selain kredit program lainnya. Persentase debitur graduasi/naik kelas adalah porsi jumlah debitur graduasi dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas sebesar 43,92% dengan target Triwulan I 2026 sebesar 5%, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.4 Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas	Persentase	5%	43,92%	120%

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Maret 2026, total debitur KUR s.d. 31 Maret 2026 sebanyak 1,11 juta debitur. Persentase Debitur KUR Graduasi/naik kelas dengan target tahun 2026 sebesar 20%. Sampai dengan Triwulan I 2026, jumlah debitur KUR graduasi/naik kelas mencapai 487.554 debitur atau telah terealisasi sebesar 43,87% atau mencapai 120% dari target Triwulan I 2026 sebesar 5%.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Realisasi
----	-------------------	--------	-----------

1	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026	Terlaksana	Telah diterbitkan Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 13 Januari 2026
2	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis terkait konsep perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
3	Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026	Terlaksana	Sosialisasi Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 12 Februari 2026
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Triwulan I 2026	Terlaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Pelaksanaan KUR Triwulan IV Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Penyalur dan Penjamin KUR guna mendorong optimalisasi penyaluran KUR kepada Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas;
2. Melakukan analisis *on desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran KUR kepada Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Beberapa Penyalur KUR cenderung menyalurkan KUR pada debitur eksisting.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta *stakeholder* terkait;

2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUR kepada Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas.

1.5 Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KUR didukung Perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta Perusahaan Penjaminan/Asuransi selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN HIMBARA merupakan penyalur utama KUR di samping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Realisasi Penyaluran KUR dihitung berdasarkan akumulasi penyaluran KUR oleh beberapa Penyalur KUR baik bank dan nonbank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Jumlah realisasi Penyaluran KUR sebesar Rp68,17 Triliun dengan target Triwulan I 2026 sebesar Rp62,79 Triliun, sehingga tercapai 108,56%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.5 Jumlah Realisasi Penyaluran KUR	Rp T	Rp62,79 T	Rp68,17 T	108,56%

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Maret 2026, realisasi KUR Januari 2026 s.d. 31 Maret 2026 sebesar Rp681,7 triliun dan diberikan kepada 1,11 juta debitur.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Realisasi
1	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite	Terlaksana	Telah diterbitkan Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 13 Januari 2026

	Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026		
2	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis terkait konsep perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
3	Melaksanakan Diskusi Terfokus dalam rangka mengoptimalkan penyaluran KUR Tahun 2026	Terlaksana	Sosialisasi Permenko 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 12 Februari 2026
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Triwulan I 2026	Terlaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Pelaksanaan KUR Triwulan IV Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Penyalur dan Penjamin KUR guna mendorong optimalisasi penyaluran KUR;
2. Melakukan analisis *on desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran KUR.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan KUR.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;

2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong optimalisasi penyaluran KUR tahun 2026 yang efektif dan tepat sasaran.

1.6

Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA)

Latar Belakang

Kredit Usaha Alsintan (KUA) adalah kredit/pembiayaan investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif, layak, dan bergerak di sektor Pertanian untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai Alat dan Mesin Pertanian yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah.

Program KUA didukung Perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta Perusahaan Penjaminan/Asuransi selaku perusahaan penjamin KUA. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUA, BUMN HIMBARA merupakan penyalur utama KUR di samping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Realisasi Penyaluran KUA dihitung berdasarkan akumulasi penyaluran KUA oleh beberapa Penyalur KUA baik bank dan nonbank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I 2026, jumlah realisasi Penyaluran KUA sebesar Rp31,99 Miliar dengan target Triwulan I 2026 sebesar Rp23,32 Miliar, sehingga tercapai 1320%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.6 Jumlah Realisasi Penyaluran KUA	Rp M	Rp93,24 M	Rp31,99 M	120%

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Maret 2026, Realisasi KUA Januari 2026 s.d. 31 Maret 2026 sebesar Rp31,99 Miliar dan diberikan kepada 46 debitur.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Realisasi
----	-------------------	--------	-----------

1	Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KUA	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan I 2026	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Penyalur dan Penjamin KUA guna mendorong optimalisasi penyaluran KUA;
2. Melakukan analisis *on desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran KUA.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyaluran KUA mengalami keterlambatan disebabkan penyesuaian kebijakan penyaluran KUA;
2. Beberapa Penyalur KUA dan Penjamin KUA belum menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta *stakeholder* terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KUA.

1.7. Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)

Latar Belakang

Kredit Industri Padat Karya (KIPK) adalah kredit/pembiayaan investasi atau kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif di sektor industri padat karya tertentu.

Program KIPK didukung Perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta Perusahaan Penjaminan/Asuransi selaku perusahaan penjamin KIPK. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KIPK, BUMN HIMBARA merupakan penyalur utama KUR di samping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Realisasi Penyaluran KIPK dihitung berdasarkan akumulasi penyaluran KIPK oleh beberapa Penyalur KIPK baik bank dan nonbank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, jumlah realisasi Penyaluran KIPK sebesar Rp66,37 Triliun dengan target Triwulan I 2026 sebesar Rp4,39 Miliar, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.6 Jumlah Realisasi Penyaluran KIPK	Rp M	Rp4,39 M	Rp66,37 M	120%

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Maret 2026, realisasi KIPK Januari 2026 s.d. 31 Maret 2026 sebesar Rp66,37 Miliar dan diberikan kepada 26 debitur.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Realisasi
1	Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KIPK	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan I 2026	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Penyalur dan Penjamin KIPK guna mendorong optimalisasi penyaluran KUA;
2. Melakukan analisis *on desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran KIPK.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyaluran KIPK mengalami keterlambatan disebabkan penyesuaian kebijakan penyaluran KIPK;
2. Beberapa Penyalur KIPK dan Penjamin KIPK belum menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta *stakeholder* terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KPP.

1.8. Jumlah Realisasi Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP)

Latar Belakang

Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung penyediaan dan kepemilikan rumah bagi UMKM yang digunakan untuk mendukung aktivitas usaha UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian, termasuk penyerapan tenaga kerja dan penguatan industri pendukung.

Dalam pelaksanaannya, Program KPP didukung Perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta Perusahaan Penjaminan/Asuransi selaku perusahaan penjamin KPP. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KPP, BUMN HIMBARA merupakan penyalur utama KPP di samping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Realisasi Penyaluran KPP dihitung berdasarkan akumulasi penyaluran KPP oleh beberapa Penyalur KPP baik bank dan nonbank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, jumlah realisasi Penyaluran KPP sebesar Rp10,12 Triliun dengan target Triwulan I 2026 sebesar Rp2,81 Triliun, sehingga tercapai 120%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.8 Jumlah Realisasi Penyaluran KPP	Rp T	Rp2,81 T	Rp10,12 T	120%

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Maret 2026, realisasi KPP Januari 2026 s.d. 31 Maret 2026 sebesar Rp10,12 triliun dan diberikan kepada 49.661ndebitur.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Realisasi
1	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
2	Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KPP	Terlaksana	Sosialisasi Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KPP tanggal 13 Januari 2026
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan I 2026	Terlaksana	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja KPP Tahun 2025 dan Persiapan Penyaluran Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Penyalur dan Penjamin KPP guna mendorong optimalisasi penyaluran KPP;
2. Melakukan analisis *on desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran KPP.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyaluran KPP mengalami keterlambatan disebabkan penyesuaian kebijakan penyaluran KPP;
2. Beberapa Penyalur KPP dan Penjamin KPP belum menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta *stakeholder* terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong penyaluran KPP.

1.9

Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program KUR didukung Perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta Perusahaan Penjaminan/Asuransi selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN HIMBARA merupakan penyalur utama KUR di samping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.

Persentase pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan perlakuan khusus kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pascabencana di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilai berdasarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana dari sisi substansi kebijakan. Penilaian efektivitas dilakukan terhadap pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Perlakuan khusus	Realisasi
1	Grace Period	Pemberian masa tenggang kepada debitur KUR di wilayah terdampak bencana, di mana kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga/margin tidak dibayarkan selama masa tenggang tanpa dikenakan sanksi.
2	Restrukturisasi	Penataan ulang struktur kredit KUR agar debitur KUR di wilayah terdampak bencana dapat melanjutkan kewajibannya tanpa harus mengalami gagal bayar, melalui perpanjangan jangka waktu dan/atau suplesi
3	Percepatan Pemulihan	Penyaluran KUR baru di wilayah terdampak bencana dengan relaksasi kemudahan administratif dan suku bunga yang ditanggung debitur di wilayah terdampak bencana sebesar 0% di tahun 2026

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana sebesar 20% dengan target Triwulan I 2026 sebesar 20%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.9. Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana	Persentase	20%	20%	100%

Persentase Pelaksanaan Perlakuan Khusus KUR Pascabencana dengan target tahun 2026 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan I 2026 telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target Triwulan I 2026 sebesar 20%. Pencapaian ini didasarkan atas realisasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan I 2026.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Realisasi
1	Sosialisasi Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR kepada <i>stakeholder</i> terkait	Terlaksana	- Sosialisasi Permenko 2 Tahun 2026 terkait KUR Pascabencana di Padang, Sumbar tanggal 6 Februari 2026 - Sosialisasi Permenko 2 Tahun 2026 terkait KUR Pascabencana di Medan, Sumut tanggal 20 Februari 2026 - Sosialisasi Permenko 2 Tahun 2026 terkait KUR Pascabencana di Banda Aceh, Aceh tanggal 27 Februari 2026
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR pascabencana Triwulan I 2026	Terlaksana	- Rapat Pembahasan Implementasi Permenko 2 Tahun 2026 terkait KUR Pascabencana tanggal 18 Februari 2026 - Rapat Pembahasan Usulan Pengaturan Kebijakan Penghapusan KUR Pascabencana tanggal 20 Februari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur KUR Pascabencana terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUR Pascabencana Tahun 2026.
2. Melakukan analisis *on desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran KUR Pascabencana.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan KUR Pascabencana.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong optimalisasi penyaluran KUR Pascabencana tahun 2026 yang efektif dan tepat sasaran.

1.10

Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disebutkan mengacu pada persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis. Penugasan pemerintah kepada BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang dikoordinasikan diantaranya mencakup:

1. Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Penyaluran Kredit Industri Padat Karya, dan Penyaluran Kredit Program Perumahan;
2. Pelaksanaan penugasan kepada BUMN jasa keuangan yang berada di dalam Ekosistem Bullion dalam rangka penguatan ekosistem bullion di Indonesia

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis untuk memperkuat akses permodalan dan mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional, serta mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar 20% dengan target Triwulan I 2026 sebesar 20%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.10. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Persentase	20%	20%	100%

Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah di BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan target tahun 2026 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan I 2026 telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target Triwulan I 2026 sebesar 20%. Pencapaian ini didasarkan atas realisasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan I 2026.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Realisasi
1	Koordinasi awal dengan Bank Himbara terkait dengan penugasan pemerintah untuk penyaluran Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026
2	Rapat Koordinasi Pembahasan dengan BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dalam pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bullion	Terlaksana	Rapat Koordinasi Kegiatan Usaha Bullion tanggal 30 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur KUA, KIPK, dan KPP terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUA, KIPK, dan KPP Tahun 2026;
2. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Pelaksana Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion Tahun 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari

efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan KUA, KIPK, dan KPP Tahun 2026.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong optimalisasi penyaluran KUA, KIPK, dan KPP Tahun 2026 yang efektif dan tepat sasaran.

2

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan KUR Pascabencana.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana sebesar 20% dengan target Triwulan I 2026 sebesar 20%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana	Persentase	20%	20%	100%

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, KIPK, KPP, dan KUR Pascabencana dengan target tahun 2026 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan I 2026 telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target Triwulan I 2026 sebesar 20%. Hal ini berdasarkan realisasi Rencana Aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan I 2026.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I 2026	Status	Realisasi
1	Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pelaksanaan KUR, KUA, KIPK, KPP dan KUR Pascabencana	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Kredit Program Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Penyalur KUA, KIPK, dan KPP terkait dengan optimalisasi Penyaluran KUA, KIPK, dan KPP Tahun 2026;

2. Melakukan analisis *on desk* dalam rangka pemantauan dan evaluasi Penyaluran KUA, KIPK, dan KPP Tahun 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi kebijakan KUA, KIPK, dan KPP Tahun 2026.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong optimalisasi penyaluran KUA, KIPK, dan KPP Tahun 2026 yang efektif dan tepat sasaran.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh K/L terkait dan kebijakan tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion sebesar 20% dengan target triwulan II 2026 sebesar 20%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait	Persentase	20%	20%	100%

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion dengan target Tahun 2026 sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan I 2026 telah terealisasi sebesar 20% atau mencapai 100% dari target Triwulan I 2026 sebesar 20%. Pencapaian ini didasarkan atas realisasi rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan I 2026.

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, sehingga target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I 2026	Status	Realisasi
1	Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Pengembangan Usaha BUMN Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis terkait dengan pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion	Terlaksana	Rapat Koordinasi Kegiatan Usaha Bulion tanggal 30 Januari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang efektif dan terfokus kepada Pelaksana Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion Tahun 2026;
2. Pemantauan dan evaluasi penyusunan regulasi terkait Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion Tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses koordinasi dan sinkronisasi data membutuhkan waktu yang lebih panjang mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan dan verifikasi data;
2. Keterbatasan waktu dalam penyusunan regulasi terkait kebijakan Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion.

Berdasarkan kendala serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya:

1. Memperkuat koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait;
2. Meningkatkan komunikasi efektif dalam mendorong optimalisasi Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion.

3

Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan

Layanan

Sinkronisasi,

Koordinasi dan

Pengendalian

Kebijakan di Bidang

Pengembangan

Badan Usaha Milik

Negara Bidang Jasa

Keuangan dan

Usaha Bisnis

Latar Belakang

Sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas berfokus pada tugas dan fungsi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang mencakup:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	120%

*Merujuk realisasi 2025 dan proyeksi Semester I 2026

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden. Dengan total responden sebesar 22 responden

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I 2026	Status	Realisasi
1	Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Semester I 2026	Terlaksana	- Penyusunan konsep awal Survei Kepuasan Layanan kepada stakeholder atas kinerja pelayanan unit kerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis - Berkas pengumpulan data responden Survei Kepuasan Layanan unit kerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
2	Penguatan <i>engagement</i> dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/ undangan)	Terlaksana	Melaksanakan forum koordinasi/rapat teknis kebijakan bersama para stakeholder terkait

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Komunikasi yang efektif kepada stakeholder dalam rangka persiapan Survei Kepuasan Layanan unit kerja;

2. Penyusunan konsep pertanyaan Survei Kepuasan Layanan kepada stakeholder

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Dalam upaya mencapai target Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala diantaranya belum optimalnya tingkat partisipasi responden dalam pengisian Survei Kepuasan Layanan unit kerja. Dengan demikian diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan tingkat respons yang memadai sehingga hasil survei dapat mendukung pengukuran capaian kinerja secara optimal.

Berdasarkan kendala yang dihadapi serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dimaksud, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya melalui peningkatan partisipasi responden serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penyelesaian pengisian Survei Kepuasan Layanan unit kerja pada tahun 2026.

4

Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang Berkualitas

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4. 1.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Latar Belakang

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis yang baik merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program keasdepan dengan baik. Dalam pelaksanaannya program Keasdepan ditunjang dengan kegiatan administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung melalui manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Tata Kelola asisten deputi yang baik merupakan *cascading* dari “*Terwujudnya Tata Kelola yang Baik*”. Dengan terwujudnya tata kelola di seluruh Asisten Deputi dalam satu Deputi diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan kegiatan yang optimal yang kemudian dapat mendorong kinerja Deputi pada umumnya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis sebesar 20% dengan target Triwulan I 2026 sebesar 20%, sehingga tercapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis				
	Persentase	20%	20%	100%

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I 2026	Status	Realisasi
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027	Terlaksana	Penyusunan Renja Tahun 2027
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI melalui aktivasi akun SRIKANDI seluruh pegawai serta pendistribusian disposisi

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi
2. Optimalisasi digitalisasi arsip di unit kerja Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Penyusunan Manual IKU, Rencana Aksi (Renaksi), dan Laporan Kinerja Triwulanan masih dilaksanakan secara manual;
2. Aplikasi SRIKANDI masih mengalami kendala teknis yang menghambat pelaksanaan digitalisasi administrasi dan pengelolaan dokumen.

Berdasarkan kendala yang dihadapi serta capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan ke depannya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Sekretariat Deputi dan Biro Perencanaan dalam rangka penyusunan Manual IKU, Rencana Aksi (Renaksi), dan Laporan Kinerja Triwulanan;
2. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI melalui pelaksanaan sosialisasi internal, disertai koordinasi yang berkelanjutan dengan tim *helpdesk* SRIKANDI terkait optimalisasi kinerja sistem.